

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun salah satu daerah yang memiliki potensi tambang batubara yang besar, aktifitas kegiatan penambangan berdampak pada kerusakan lingkungan dan kehilangan lahan produktif. kegiatan pertambangan batubara telah menjadi sumber pendapatan utama bagi Kabupaten Sarolangun, PT Surya Global Makmur merupakan salah satu perusahaan tambang batubara yang beroperasi di daerah tersebut. Namun, kegiatan pertambangan ini juga berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, analisis keberlanjutan lahan pascatambang batubara PT Surya Global Makmur perlu dilakukan untuk mengetahui status keberlanjutan lahan pascatambang dan mengetahui indikator paling berpengaruh dalam keberlanjutan dari dimensi ekologi, ekonomi dan dimensi sosial.

Dampak positif yang selayaknya dapat dirasakan manfaatnya, antara lain; dapat memberi peluang masyarakat sekitar untuk membangun sentra ekonomi masyarakat, sebagai sumber pendapatan asli daerah kabupaten dan provinsi, dan Sebagai wadah lapangan kerja masyarakat (Suprpto, 2019).

Sedangkan dampak negatif atas keberadaan tambang di masyarakat lingkaran tambang yang selama ini terjadi adalah terjadinya beberapa masalah yang menyangkut aspek ekologi/lingkungan dan juga sosial ekonomi kemasyarakatan.

Dari aspek sosial ekonomi dapat juga dirasakan, mulai dari beberapa konflik yang terjadi (konflik sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat desa), ketidaksesuaian jarak konsesi galian tambang dengan ruang huni masyarakat/fasilitas umum, kemudian juga truk-truk pengangkut batubara yang hilir-mudik (dengan bobot tonase yang sering melebihi kapasitas) di jalanan semakin mengkhawatirkan aktivitas perekonomian masyarakat (Suprpto, 2019).

Fenomena kecenderungan pergeseran mata pencaharian masyarakat juga terjadi, jika sebelum adanya tambang batubara mayoritas masyarakat desa adalah sebagai petani karet (penyadap karet), namun setelah hadirnya tambang batubara di desa mereka yang luas konsesinya mencapai 802 hektar, secara geografis dan matematis banyak dari masyarakat terpaksa menjadi korban pembebasan lahan perusahaan, sehingga masyarakat kemudian beralih profesi demi untuk mempertahankan hidup mereka, berwirausaha atau bahkan merantau adalah salah satu cara yang paling realistis (Agustian, 2014).

Pengelolaan sumberdaya alam yang ada di Provinsi Jambi saat ini masih dalam fase ketidakadilan. Baik dalam konteks hak pengelolaan oleh rakyatnya maupun dalam konteks keberlanjutan lingkungannya. Ketimpangan penguasaan wilayah kelola yang saat ini masih didominasi penguasaannya oleh kelompok-kelompok industri berbanding lurus dengan laju kerusakan lingkungan sebagai efek sampingnya.

Melihat atas dampak-dampak yang sering terjadi dari sektor industri pertambangan batubara ini, memang berdampak sangat signifikan baik dalam artian positif maupun artian negatif. Tanpa menampik dampak positifnya, dampak negatif dalam aspek lingkungan, sosial, ekonomi yang ditimbulkan sektor industri pertambangan batubara ini sangatlah luar biasa dampaknya (Kotijah, 2011).

Berdasarkan data MODI ESDM Ada lebih 172.409 hektar konsesi tambang batubara di Provinsi Jambi, dari total 126 perusahaan namun yang beroperasi berjumlah 90 IUP yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba juga mencatat (2023) jumlah cadangan batubara di Jumlah cadangan batubara di Jambi sebesar 1,9 miliar ton, jumlah cadangan ini menjadikan Jambi sebagai wilayah terbesar konsesi batubara ke dua di pulau Sumatera setelah Sumatera Selatan dan yang ke lima di Indonesia. Badan Keuangan Daerah Jambi juga mencatat jika pada tahun 2022 diperkirakan Pemerintah Provinsi akan mendapat minimalnya Rp. 101.080.812.90 miliar dari industri batubara (Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi).

Pemanfaatan sumberdaya alam harus dilakukan secara optimal dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia yang merupakan tujuan dari pada pembangunan. Pemanfaatan sumberdaya alam yang dilakukan melalui kegiatan pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yakni dengan memperhatikan secara serius aspek lingkungan, sosial maupun ekonomi

Permasalahan yang timbul adalah pada pascatambang batubara akan menimbulkan beberapa masalah seperti pendapatan dan usaha penduduk setempat menurun dan bahkan pengeluaran lebih banyak dari pada pendapatan. Hal ini dikarenakan lahan pertanian yang mereka garap sudah dikonversi menjadi lahan tambang. Selain itu, juga terjadi konflik antara masyarakat dengan pemilik lahan tambang karena pada umumnya para penambang tidak mau memperbaiki dampak yang terjadi akibat penambangan, sehingga terjadi pencemaran lingkungan

Agar lahan pascatambang batubara ini dapat berkelanjutan maka perlu diterapkan konsep pembangunan berkelanjutan(*sustainable development*), sehingga manfaat yang

diperoleh dari lahan pascatambang batubara ini tidak saja dirasakan oleh generasi masa kini tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Manfaat tersebut tidak lain adalah manfaat dari tiga dimensi Pembangunan berkelanjutan yaitu dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial.

Mengingat pentingnya mengetahui status keberlanjutan setiap dimensi, dilakukan penelitian untuk mengetahui status keberlanjutan lahan pascatambang batubara di Kabupaten Sarolangun dilihat dari tiga dimensi sebagaimana disebutkan diatas.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah berakhir proses kegiatan penambangan, kesejahteraan masyarakat menurun dikarenakan berkurangnya lahan pertanian akibat dikonversi menjadi lahan tambang, sehingga lahan tidak dapat ditanami. Sebagai contoh, pendapatan rata-rata per bulan masyarakat di sekitar tambang di Kabupaten Sarolangun pada waktu proses penambangan hasil wawancara dengan penduduk masyarakat sekitar tambang sebesar Rp 5.000.000, sedangkan pada waktu pascatambang pendapatan rata-rata menurun menjadi Rp 3.300.000, Hal ini berarti ada penurunan tingkat pendapatan rata-rata sebesar Rp 1.700.000

Masalah lainnya yang timbul adalah terkait aspek sosial, antara lain terjadinya konflik kepentingan penduduk asli yang memandang hutan sebagai bagian hidupnya dengan para pengusaha yang memandang hutan sebagai suatu cadangan Batubara yang bisa diambil sebagai keuntungan. Sementara itu, paradigma baru penambangan adalah pembangunan manusia berkelanjutan dalam sektor penambangan yang esensinya adalah menciptakan transformasi sosial menuju kesejahteraan antar generasi. Oleh sebab itu, informasi tentang data kualitas sumberdaya lahan pascatambang, aspek sosial ekonomi masyarakat di sekitar tambang, persepsi dari masyarakat terhadap lahan pascatambang perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan status keberlanjutan lahan pascatambang batubara di Kabupaten Sarolangun. sehingga diharapkan diperoleh hasil penelitian yang dapat memecahkan masalah lingkungan pascatambang.

Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

Permasalahan yang difokuskan dalam rencana penelitian ini dirumuskan berdasarkan kondisi yang ada di lokasi penelitian:

1. Bagaimana status keberlanjutan lahan pascatambang dari dimensi ekologi, ekonomi dan sosial?
2. Bagaimana Mengetahui indikator yang paling berpengaruh dalam keberlanjutan lahan pascatambang dari dimensi ekologi, ekonomi dan sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui status keberlanjutan lahan pascatambang dari dimensi ekologi, ekonomi dan sosial.
2. Mengetahui indikator yang paling berpengaruh dari dimensi ekologi, ekonomi dan sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Gambaran yang jelas dan komprehensif tentang keberlanjutan lahan pascatambang di Kabupaten Sarolangun sehingga dapat menjadi acuan untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan;
2. Menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang keberlanjutan lahan pascatambang dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lahan pascatambang;
3. Menjadi bahan rujukan bagi para pihak baik perusahaan sebagai pengelola kawasan, Pemerintah Daerah maupun pusat dalam menyusun program pengelolaan lahan pascatambang;
4. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Jambi.